BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan yang diterapkan dalam suatu Negara memiliki perbedaan oleh latar belakang Negara yang berbeda. Penggunaan sistem pemerintahan dalam suatu Negara terkadang merupakan suatu proses trial dan juga termasuk didalamnya persaingan untuk mendapatkan pengaruh, kekuasaan, dan faktor kepentingan.

Sistem pemerintahan Islam yang ada pada masa awal perkembangan Islam (Masa Nabi Muhammad) dapat menciptakan masyarakat yang berkeadaban yang pada mulanya berpola pikir *jahiliyyah*. Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pemimpin yang tidak dapat di bantah (*Unguestionable Leader*) bagi NegaraIslam yang baru lahir pada masa itu. Sebagai Nabi, beliau meletakkan prinsip-prinsip Agama (Islam) seperti: Memimpin shalat, menyampaikan berabagai khotbah. Sebagai negarawan, beliau mengutus duta keluar negeri untuk membentuk angkatan perang, dan membagikan rampasan perang secara adil dan bijaksana. Dalam masa pemerintahannya, beliau membentuk piagam Madinah yang dianggap sebagai dokumen HAM, yang berisi tentang persaudaraan dengan ikatan iman yang bersifat ideologis dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

landasan bagi prinsip saling menghormati dan menghargai di antara muslim dan yang bukan muslim.

Pada masa Khulafaurrasyidin yang berlangsung selama 30 tahun, pemerintahan Islam sudah mulai mengalami berbagai perubahan yang menimbulkan berbagai konflik yang mulai tampak tajam pada masa Kholifah ke 3 (Usman Bin Affan ra). Pada masa itu muncullah bermacam-macam ideologis seperti Favoritisme dan Nepotisme yang dilakukan oleh sekelompok pejabat pemerintahan, yang pada akhirnya mengakibatkan terbunuhnya Utsman itu sendiri.

Pada masa Ali pemerintahan Islam mengalami gejolak yang lebih dahsyat. Saat itu muncul berbagai ragam faksi politik, yang membentuk spektrum pemikiran politik Islam, yaitu kaum Khawarij, Syiah, dan Sunni. Yang setiap kelompok ini mempunyai pemikiran yang saling berseberangan dan kaum-kaum tersebut dan membentuk ideologinya masing-masing.[1] Pada masa-masa berikutnya sistem pemerintahan Islam lebih cenderung ke sistem warisan yang dimulai ketika masa Muawiyah pada pemerintahan Dinasti Umayah.[2]

Indonesia hingga saat masih ini menggunakan sistem demokrasi dalam menjalankan ke pemerintahannya. Demokrasi dianggap efektif bagi perkembangan Indonesia karena pada masa sebelumnya, beberapa macam

[1]Dedi Supriadi, *Sejarah Peradaban Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 98-99.
[2]Ibid., 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem pernah diaplikasikan di Negara ini. Sistem demokrasi di Indonesia mengandung nilai-nilai keislaman karena sebagian besar penduduk dan pemimpin berasal dari umat Islam. Keadaan ini dapat juga disebut pemerintahan Islami atau sistem pemerintahan yang mengakomodasi nilai-nilai keIslaman. Dalam sistem pemerintahan demokrasi Indonesia, dibentuk daerah-daerah otonom untuk menjalankan proses demokrasi, agar dapat memperkecil tekanan pemerintahan, meningkatkan kebebasan politik dan tingkat kesejahteraan manusia.

Menurut Robet A. Dahl: "Otonom akan menimbulkan peluang-peluang untuk melancarkan destruksi. Setiap daerah otonom dapat berpeluang untuk mengabadikan ketidakadilan, melestarikan egoisme sempit dan juga untuk menghancurkan demokrasi itu sendiri".[3] Sehingga menurutnya setiap daerah otonom harus memiliki kualitas dan pengawasan tertentu. Selain itu, pada sistem demokrasi di Negeri ini yang menggunakan pemilu dengan sistem multipartai, dalam pemilihan wakil-wakil rakyat saja masih terdapat banyak kekurangan, seperti operasional yang besar tapi tidak efektif, sebagai contoh adalah lambatnya perhitungan suara dan kondisi IT yang amburadul, padahal biaya IT sangatlah besar, sehingga mensinyalir ada unsur KKN. Dilihat dari tendernya saja, pengadaan IT pemilu tidak melalui lelang, tetapi melalui penunjukan langsung. Ini menjadi tanggung jawab bagi para pemimpin dan

[3]Robert A. Dahl. *Dilema Demokrasi pluralis: Antara Otonomi dan Control* (Jakarta: Rajawali,1985.), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dipimpin (rakyat), dan juga kita sebagai mahasiswa sebagai generasi masa depan.

Kita harus bisa membuat suatu perubahan ke arah yang lebih baik dan harus bersikap lebih dewasa dalam segala hal. Karena salah satu bentuk ketidakdewasaan adalah melakukan hal yang sama secara berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Ironis memang, jika kita melihat masalah-masalah yang terjadi dalam pemilu yang berskala nasional saat ini, Jika melihat realita yang terjadi ketika diadakan pesta demokrasi skala kecil seperti di sekolah atau di tingkat perguruan tinggi, kita masih merasa kesulitan dalam menghadapi masalah yang muncul.

Sebagai solusi kita harus bisa mengatasi penyebab runtuhnya umat Islam pada masa ini. Kita juga harus bisa meneladani dan mengambil hikmah kisah yang terjadi pada zaman khalifah Ali ra. Ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada beliau, "Ya.. Ali…!!, Pada masa khalifah Abu Bakar keadaan umat Islam tidak kacau seperti ini, begitu juga pada masa khalifah Umar dan Utsman ". Kemudian Ali menjawab: "Dulu ketika masa pemerintahan Abu Bakar, Umar dan Usman, mereka memimpin orang-orang seperti aku dan sekarang aku memimpin orang-orang seperti kamu". Artinya adalah Keberhasilan seorang pemimpin bukan hanya di tentukan oleh pemimpin itu sendiri, tetapi lebih dari itu oleh orang-orang yang dipimpinnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari bebrapa hal tersebut di atas penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul "*Perbandingan sitem pemerintahan Khilafah dan sistem pemerintahan Demokrasi".*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ; " Perbandingan Sistem Pemerintahan Khilafah dan Demokrasi".

Untuk menjabarkan pokok masalah tersebut, penulis mengemukakan beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pemerintahan Khilafah ?
2. Bagaimana sistem pemerintahan Demokrasi ?
3. Bagaimana perbandingan sistem pemerintahan Khilafah dan Demokrasi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem dan kebijakan dalam pemerintahan Khilafah khususnya pada masa Muawiyah.
2. Untuk mengetahui sistem dan kebijakan pemerintahan Demokrasi khusunya di Indonesia.
3. Untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dalam kedua sistem Khilafah dan Demokrasi.

D. Kegunaan Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi intelektual guna menambah khasanah ilmiah dibidang Sejarah Kebudayaan Islam, khususnya di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Diharapkan dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kalangan Akademis, terutama menyikapi kebradaan sejarah masa lampau untuk pelajaran di masa kini dan yang akan datang.
3. Diharapkan dapat memberi manfaat bagi kalangan mahasiswa yang bergelut dalam bidang sejarah dan kebudayaan Islam.

E. Pendekatan dan Kerangka Teoritik

1. Pendekatan

Dalam penelitian tentang perbandingan sistem pemerintahan Khilafah dan sistem pemerintahan Demokrasi penulis menggunakan pendekatan *histories*, maksudnya didalam mendiskripsikan masalah ini penulis menggambarkan pemerintahan Khilafah Umayyah dan pemerintahan Demokrasi di Indonesia.

Melakukan pendekatan *politik*, dimana pendekatan ini digunakan untuk mengetahui politik Umayyah dan sistem Demokrasi di Indonesia mengenai kebijakan-kebijakan yang berlaku dalam sistem tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kerangka Teori

Secara umum penelitian ini adalah tentang *histories*, selain itu penulisan dalam skripsi ini juga menggunakan teori max weber tentang kepemimpinan, menurutnya ada 3 tipe kepemimpinan yang dimilki oleh para pemimpin agama yaitu *pertama,* tipe kepemimpinan kharismatik bahwa keparuhan diberikan kepada pemimpin yang diakui karena sifat-sifat keteladanan pribadi yang dimilikinya. *Kedua,* kepemimpinan tradisional bahwa tugas mereka adalah mempertahankan aturan-aturan yang telah berlaku dalam agama, dan *ketiga,* kepemimpinan legal bahwa kekuasaan bersumber dan dibatasi oleh hukum.[4]

Selain teori tersebut penulis juga menggunakan teori Abul A'la Al-Maududi tentang tujuan diselenggarakannya Negara yaitu *pertama* untuk mengelakkan terjadinya eksploitasi antar-manusia, antar-kelompok, atau antar-kelas dalam masyarakat. *Kedua* untuk memelihara kebebasan (ekonomi, politik, pendidikan dan agama) para warga Negara dan melindungi seluruh warga Negara dari invasi asing. *Ketiga* untuk menegakkan sistem keadilan sosial yang seimbang sebagaimana di kehendaki oleh Al-qur'an. *Keempat* untuk memberantas setiap kejahatan dan mendorong setiap kebijakan. *Kelima* menjadikan Negara itu sebagai tempat tinggal yang teduh dan mengayomi bagi setiap warga Negara dengan jalan pemberlakuan hukum tanpa diskriminasi.[5]

[4]S. Riberu, *Dasar-Dasar Kepemimpinan* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992),5.
[5]Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan* (Bandung: Mizan, 1988), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari teori ini penulis berharap dapat meneliti kelebihan dan kelemahan apa dalam perbandingn sistem pemerintahan Khilafah dan sistem pemerintahan Demokrasi.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan usaha untuk menunjukkan sumber-sumber yang terkait dengan judul skripsi ini, sekaligus menelusuri tulisan atau penelitian tentang masalah yang dipilih dan juga untuk membantu penulisan dalam menemukan data sebagai bahan perbandingan, supaya data yang dikaji itu lebih jelas.

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa literatur sebagai bahan bacaan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Di antara literatur yang penulis pergunakan dalam menyusun skripsi ini, antara lain; *Khilafah dan Kerajaan* karangan Abul A'ala Al-maududi, membahas antara lain sejarah pemerintahan Islam, hanya beberapa dasawarsa setelah sepeninggal Rosulullah s.a.w.

Buku *Sejarah Peradaban Islam* karangan Dedi Supriyadi membahas tentang peradaban Islam semenjak sejarah pra-Islam sampai peradaban modern Islam di Asia tenggara termasuk Indonesia.

Skripsi dengan judul *Kebijakan Politik Muawiyah: Khilafah Pertama Bani Umaiyah 661-680M* yang di tulisoleh Neti Rahmawati pada 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sejarah Nugroho Noto Susanto,[6] dimana langkah-langkah dapat dijabar meliputi beberapa pokok:

1. Heuristik, yaitu proses mencari untuk menemukan sumber-sumbernya. Maksudnya adalah kegiatan mengumpulan buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan dalam skripsi ini. Sedangkan data dari pembahasan ini hanyalah melalui sumber kepustakaan, yang bisa dipakai untuk bahan rujukan yang sesuai dengan pembahasan dalam sekripsi berjudul "Perbandingan sistem pemerintahan Khilafah dan sistem pemerintahan Demokrasi.
2. Pengolahan data, yaitu untuk memperoleh fakta yang valid sesuai dengan penulisan skripsi ini, maka data-data itu diolah melalui:
   a. Selektif data, yaitu memilih data yang dianggap sesuai dengan penulisan skripsi berjudul "Perbandingan sistem pemerintahan Khilafah sistem pemerintahan Demokrasi.
   b. Komparatif, yaitu membandingkan fakta-fakta dari fenomena-fenomena sejenis pada periode masa lampau untuk memudahkan dalam skripsi berjudul "Perbandingan sistem pemerintahan Khilafah dan sistem pemerintahan Demokrasi.

[6]Nugroho Notosusanto, *Masalah penelitian Sejarah Kontemporer* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1978), 11-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Interpretasi, yaitu menetapkan makna yang saling berhubungan dari fakta-fakta yang telah diperoleh.
4. Historiografi, yaitu langkah untuk menyajikan hasil penafsiran fakta sejarah ke dalam bentuk-bentuk tulisna menjadi kisah.[7] Artinya: dari sumber-sumber yang ada disusun menjadi suatu kisah dalam hal ini yaitu "Perbandingan sistem pemerintahan Khilafah dan sistem pemerintahan Demokrasi.

Setelah pengolahan data dan interpretasi terhadap data tentang penulisan sistem Khilafah dan sistem Demokrasi Indonesia , selanjutnya penulis menyajikan dalam bentuk tulisan Perbandingan sistem pemerintahan Khilafah dan Demokrasi.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini pembahasannya dibagi menjadi lima bab, yang antara satu dan yang lainnya berkaitan.

Pada bab pertama berisi pendahuluan yang terdidri dari sub bab antara lain : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Pendekatan dan Kerangka Teotik, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika Pembahsan, dan Daftar Pustaka.

[7]Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Grafindo, cet. XI, 1998), 84-90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah membahas pendahuluan, penulis menguraikan mengenai definisi sistem pemerintahan Khilafah, serta kebijakan-kebijakan di dalam sistem tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran umum tentang bagaimana sistem khilafah tersebut berjalan.

Bab ketiga ini penulis mengemukakan tentang bagaimana sistem Demokrasi dan kebijakan-kebijakan apa yang terdapat dalam sistem tersebut. Setelah pembahsan ini, baru menginjak pembahsan mengenai bab keempat yaitu perbandingan sistem Khilafah dan sistem Demokrasi.

Dalam bab keempat ini penulis mengemukakan tentang perbandingan sistem Khilafah dan sistem Demokrasi meliputi kelebihan dan kelemahan apa saja yang terdapat pada kedua sistem tersebut.

Setelah bab demi bab dibahas, berikutnya penulis mengemukakan kesimpulan dari uraian yang telah dijabarkan pada bab terdahulu dan juga serangkain saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id